

POTENSI DAN PROYEKSI EKONOMI MAKRO KOTA TANGERANG

Lestari Agusalim
Universitas Trilogi
e-mail: lestariagusalim@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyse the potency and projection of the economy of Tangerang Municipality during 2014 to 2018. By doing so, the local government of Tangerang can use such information to formulate the appropriate policies to foster inclusive economic growth. This study is essential as Tangerang Municipality experienced a slow down in economic growth in 2014 compared to the previous year. This study uses quantitative methods namely Location Quotient (LQ) analysis, to identify leading sectors of the economy, and Least Squares Method, to make a projection of the economy. In addition, descriptive analysis is also used to briefly interpret the quantitative data and formulate policy recommendations. The results show that: (1) the leading sectors of Tangerang Municipality are manufacturing industry sector, transportation and warehousing sector, information and communication sector, and business services sector, (2) the projection analysis showed that in 2018, based on constant price and current price RGDP, Tangerang Municipality will experience positive economic growth. This will also be true for per capita RGDP. Moreover, inflation and open unemployment rate will decline.

Keywords: Potency of Economy, Projection, RGDP

PENDAHULUAN

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh pembangunan ekonomi daerah yang berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki. Pada umumnya potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki berbeda antarsatu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, informasi daerah yang lengkap, akurat dan terkini sangat diperlukan untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut.

Dalam kerangka tersebut, Pemerintah daerah Kota Tangerang dituntut untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan di wilayahnya yang dimanifestasikan dengan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang. Menurut Tjitroresmi *et.al.*, (2006), dalam era otonomi daerah, banyak kabupaten/kota yang memfokuskan pada pemanfaatan potensi unggulan sebagai ladang peningkatan pendapatan asli dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki oleh daerah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan pertumbuhannya adalah dengan mengoptimalkan

penggalan potensi sumber daya yang dimiliki melalui pengembangan sektor-sektor produktif melalui pemasaran produk-produk unggulan daerah yang layak ditumbuhkembangkan dan ditawarkan kepada para investor. Usaha ini muncul terkait dengan perlunya revitalisasi kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Tangerang dalam bidang promosi investasi, pemberian insentif investasi dan penyederhanaan prosedur perizinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan output yang dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi sehingga dapat menggambarkan bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor ekonomi tersebut pada suatu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output. Maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat. Pertumbuhan ekonomi mutlak harus ada, sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah, dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan faktor apa yang perlu dihindari agar pertumbuhan ekonomi tidak berjalan ditempat atau mengalami kemunduran.

Indikator kinerja makro untuk bidang ekonomi yang paling sering digunakan dan dinilai mampu merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah Kota Tangerang dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 (tujuh belas sektor) lapangan usaha. Jumlah PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (*current price*) maupun berdasarkan harga konstan (*constant price*).

Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB, Pemerintah Kota Tangerang menggunakan PDRB harga berlaku dan harga konstan. PDRB ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang atas barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran adalah PDRB per kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi jumlah PDRB dengan jumlah penduduk. Angka pendapatan per kapita memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dan dapat merepresentasikan tingkat kesejahteraan Kota Tangerang. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan prosentase kenaikan atau penurunan PDRB satu tahun dibandingkan angka tahun sebelumnya. Selaras dengan indikator kinerja PDRB, kedua indikator kinerja makro ini merepresentasikan keberhasilan ataupun kegagalan menyeluruh dari Pemerintah Kota Tangerang di dalam menjalankan misinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kota Tangerang, pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Kota Tangerang pada tahun 2014 adalah sebesar 6,17% lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yaitu 6,73%. Sektor usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor informasi dan komunikasi (22,99%) diikuti sektor jasa lainnya 18,12% dan Sektor konstruksi 15,39% (Lihat Tabel 1). Hal ini mengindikasikan bahwa mulai terjadi pergeseran sektor/lapangan usaha

unggulan dimana sektor/lapangan usaha industri pengolahan mulai tergeser perannya oleh ketiga sektor/lapangan usaha potensial lainnya, yaitu: informasi dan komunikasi, sektor jasa lainnya, dan sektor konstruksi. Dengan demikian, ketiga sektor/lapangan usaha tersebut akan berpotensi sebagai sektor/lapangan usaha yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang besar di samping lapangan usaha di bidang industri pengolahan.

Tabel 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Kota Tangerang Tahun 2012–2014
(Dalam Persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	2,59	5,78	9,69
Pertambangan & Penggalian	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	6,33	8,05	1,81
Pengadaan Listrik dan Gas	4,33	6,65	2,78
Pengadaan Air	-	7,56	7,85
	0,91		
Konstruksi	9,21	10,9	15,39
		7	
Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,85	6,79	6,22
Transportasi & Pergudangan	9,67	2,91	2,82
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,59	3,49	14,38
Informasi dan Komunikasi	12,9	7,48	22,99
	6		
Jasa Keuangan	9,11	9,59	5,02
Real Estate	5,75	5,74	9,19
Jasa Perusahaan	4,87	5,94	13,83
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,79	1,16	14,53
Jasa Pendidikan	3,71	2,88	9,74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,93	1,32	11,89
Jasa Lainnya	0,49	7,48	18,12
LPE Kota Tangerang	7,07	6,73	6,17
LPE Provinsi Banten	6,83	7,13	5,47
LPE Nasional	6,55	5,74	5,21

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2015 (diolah)

Pada Tabel 1, terlihat adanya korelasi antara kondisi perekonomian Kota Tangerang dengan Provinsi Banten maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh perekonomian nasional, yang didalamnya telah mempertimbangkan berbagai faktor yang bersifat nasional dan internasional, memiliki hubungan yang positif dan signifikan dalam mempengaruhi perkembangan perekonomian Kota Tangerang secara keseluruhan. Dengan demikian, berbagai skenario tentang perkiraan kenaikan ataupun penurunan pertumbuhan ekonomi nasional akan senantiasa menjadi referensi utama dalam memperkirakan kondisi perekonomian Kota Tangerang.

Selain persoalan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2014 laju inflasi yang terjadi di Kota Tangerang meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 10,03% (BPS Kota Tangerang, 2015). Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius, agar perekonomian Kota

Tangerang tidak lesu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mengembangkan perekonomian Kota Tangerang maka perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai potensi ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tangerang juga kemampuan dalam memproyeksikan perekonomian dalam beberapa tahun mendatang. Kajian ini penting untuk dilakukan agar pemerintah dapat merumuskan strategi dan arah kebijakan ke depan, sehingga ekspektasi terdapat kondisi perekonomian di masa mendatang tercapai dan mensejahterakan seluruh masyarakat Kota Tangerang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut: (1) menganalisis potensi unggulan yang dimiliki oleh Kota Tangerang, (2) memproyeksikan gambaran ekonomi makro Kota Tangerang di tahun 2018, (3) memberikan rekomendasi pemanfaatan potensi sumber daya agar meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Kajian dalam literatur penelitian ini meliputi: (1) pertumbuhan ekonomi, (2) konsep daya saing dan (3) konsep pembangunan wilayah. Menurut Sukirno secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (Sukirno S, 2006).

Berdasarkan teori pertumbuhan Rowto proses pembangunan bersifat universal dengan tahap-tahap yang sama dan bersifat linear. Proses pembangunan yang universal tersebut akan melalui lima tahap, yaitu: (1) masyarakat tradisional (*traditional society*), (2) prasyarat untuk tinggal landas (*precondition for take off*), (3) tinggal landas (*take off*), (4) menuju kedewasaan (*drive to maturity*), (5) konsumsi massa yang tinggi (*high mass consumption*) (Damanhuri, et al., 1997). Masyarakat tradisional, dicirikan masih adanya stagnasi dalam produktivitas, masyarakat bercorak agraris, struktur sosial hirarkis, dan peluang meraih kemajuan bersifat terbatas.

Masyarakat Prasyarat untuk Lepas Landas (*precondition for take-off*) pada tahap ini ciri masyarakat tradisional mulai luntur dan "*the idea of progress*" telah mulai tumbuh, kemudian kegiatan pendidikan telah menyesuaikan terhadap kebutuhan kegiatan ekonomi modern. Tabungan masyarakat, kegiatan investasi, perdagangan (nasional dan internasional) semakin penting. Kemudian, bentuk negara yang terdesentralisasi dikerahkan untuk menghadapi kekuatan yang menghambat pembangunan. Dan, pembangunan infrastruktur (jalan, komunikasi, dan seterusnya) sangat diprioritaskan

Masyarakat Lepas Landas (*take-off*) yaitu masyarakat secara keseluruhan telah berhasil menyingkirkan halangan-halangan yang dapat mengganggu pertumbuhan yang reguler. Pada tahap ini, terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi: (1) tingkat investasi sekitar 10 persen dari PDB yang dapat menyamai

pertumbuhan produksi riil per kapita, (2) penciptaan sebanyak mungkin sektor industri yang menjadikan sektor ini memainkan peran menentukan untuk pertumbuhan yang tinggi, (3) terdapatnya instrumen politik, sosial, dan institusional yang memudahkan proses pertumbuhan yang berkelanjutan.

Masyarakat Menuju Kedewasaan (*drive to maturity*) pada tahap ini, dicirikan adanya: (1) kemajuan teknologi ditopang oleh struktur industri yang dominan, (2) teknologi modern telah mengendalikan semua sektor ekonomi, (3) struktur produksi ditandai oleh dominannya industri berat dan barang-barang modal (*capital goods*) telah secara penuh diproduksi dalam negeri.

Konsumsi Massa yang Tinggi (*high mass consumption*) ciri yang menonjol pada tahap ini adalah berkembangnya produksi barang-barang konsumsi tahan lama (*durable consumption goods*) dan jasa (*service*) menjadi sektor ekonomi yang utama dan secara massal masyarakat mempunyai tingkat daya beli dan tingkat kemampuan berkonsumsi berbagai tingkat kebutuhan (primer, sekunder, tersier) yang sangat tinggi.

Sedangkan teori pertumbuhan kuznet menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2003). Masing-masing dari ketiga komponen pokok dari definisi itu sangat penting untuk diketahui terlebih dahulu, yaitu: Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang merupakan tanda kematangan (*economic maturity*) dari suatu negara; Perkembangan teknologi merupakan dasar bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Ini adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja (jadi, di samping perkembangan atau kemajuan teknologi masih dibutuhkan faktor-faktor lain); Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi dibidang teknologi tanpa diikuti dengan inovasi sosial sama halnya dengan lampu pijar tanpa listrik (potensi ada, akan tetapi tanpa *input* komplementernya maka hal itu tidak bisa membuahkan hasil apapun).

Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda penting di dalam kehidupan perekonomian. Menurut Kuznets, terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisis yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya, penduduk, dan tenaga kerja. Dari keenam ciri itu, dua diantaranya adalah kuantitatif yang berhubungan dengan pertumbuhan produksi nasional dan pertumbuhan penduduk, yang dua lainnya berhubungan dengan peralihan struktural dan dua lagi dengan penyebaran internasional (Jinghan, 2004).

Keenam ciri tersebut ialah: (1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita: pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan laju kenaikan produk per kapita yang tinggi diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat, (2) Peningkatan produktivitas: pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input, (3) Laju perubahan struktural yang tinggi: perubahan struktural dalam pertumbuhan

ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produksi dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, serta perubahan status kerja buruh, (4) Urbanisasi: pertumbuhan ekonomi modern ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk dari perdesaan ke daerah perkotaan, (5) Ekspansi negara maju: pertumbuhan ekonomi modern terpusat di negara Eropa dan jajahannya di seberang lautan. Ekspansi negara-negara maju yang bermula dari bangsa-bangsa Eropa akibat revolusi teknologi dibidang transportasi dan komunikasi, (6) Arus barang, modal, dan orang antar bangsa: pertumbuhan ekonomi modern menunjukkan bahwa telah terjadi arus barang, modal, dan orang antar bangsa yang semakin meningkat sejak kuartal kedua abad ke-19 sampai perang dunia pertama (PD 1) tetapi mulai mundur pada PD 1 dan berlanjut sampai akhir PD II.

Dalam konsep daya saing seorang perencana wilayah harus memiliki kemampuan untuk menganalisa potensi ekonomi wilayahnya. Hal ini terkait dengan kewajibannya di satu sisi menentukan sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah bertumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu adalah rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Dalam hal ini, kemampuan pemerintah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan atau kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan dengan demikian turut mendorong sektor-sektor lainnya berkembang (Taringin R, 2002).

Keunggulan komparatif (*comparative advantage*), mula-mula di kemukakan oleh David Ricardo (1917) sewaktu membahas perdagangan antar dua negara. Ia berargumentasi bahwa negara-negara harus menspesialisasikan diri dalam memproduksi barang-barang yang mereka produksi secara relatif lebih efisien (Nicholson, 1999). Keunggulan komparatif timbul karena negara-negara mempunyai biaya kesempatan yang berbeda untuk memproduksi barang tertentu. Ini menimbulkan peluang bagi semua negara untuk mendapatkan manfaat perdagangan (Lipsey RG, et al., 1995). Apabila ada dua negara yang saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk menghasilkan dan mengeksport barang bagi negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, maka kedua negara tersebut akan beruntung. Akan tetapi ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat diperhatikan dalam ekonomi regional.

Sedangkan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) menganalisis kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya keluar daerah/ luar negeri/ pasar global. Istilah keunggulan kompetitif lebih mudah dimengerti, yaitu cukup melihat apakah produk yang kita hasilkan bisa dijual di pasar global secara menguntungkan. Jadi dalam hal ini kita tidak lagi membandingkan potensi komoditi suatu negara terhadap komoditi tersebut di salah satu negara lainnya, melainkan membandingkan potensi komoditi suatu negara terhadap komoditi semua negara pesaingnya di pasar global. Namun demikian, manfaat analisis keunggulan kompetitif bagi suatu wilayah adalah terbatas, karena tidak banyak komoditi yang memenuhi persyaratan tersebut (Taringin, 2002).

Banyak komoditi yang hanya diproduksi untuk kebutuhan lokal atau ada yang dipasarkan ke wilayah tetangga tetapi pada saat ini belum mampu untuk masuk ke pasar global. Sebaliknya analisis komparatif tetap dapat digunakan

untuk melihat apakah komoditi itu memiliki prospek untuk dikembangkan walaupun saat ini belum mampu memasuki pasar global. Setidaknya kita mengetahui bahwa dalam rangka perbandingan dengan rata-rata nasional. Keunggulan komparatif dapat dijadikan petanda awal bahwa komoditi itu punya prospek untuk juga memiliki keunggulan kompetitif. Setidaknya komoditi itu layak untuk dikembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun untuk pasar tetangga.

Sementara konsep pembangunan wilayah berkaitan dengan kebijakan pembangunan regional yang pada dasarnya merupakan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi pembangunan atau masyarakat yang diinginkan, baik pada saat sekarang maupun untuk periode tertentu dimasa mendatang. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat (Sjafrizal, 2008).

Sama halnya dengan tingkat nasional, kebijakan pembangunan daerah juga diperlukan pada tingkat regional. Kebijakan pada tingkat regional diperlukan karena kondisi, permasalahan, dan potensi pembangunan yang dimiliki oleh suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan juga tidak sama. Di samping itu, antara suatu daerah dengan daerah lainnya akan mempengaruhi pula kondisi dan pembangunan pada daerah terkait. Karena itu, kebijakan pada tingkat nasional yang diberlakukan secara umum pada seluruh wilayah tidak akan sesuai untuk memecahkan masalah pembangunan pada masing-masing daerah. Untuk dapat memaksimalkan proses pembangunan daerah, maka kebijakan pembangunan regional perlu diterapkan untuk masing-masing daerah.

Sasaran pembangunan menurut Todaro (2003) yaitu: (1)meningkatkan persediaan dan perluasan pembagian/pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan, dan lingkungan, (2)mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran harga diri baik individu maupun nasional, (3) memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua pilihan individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Pada kenyataannya, tidak semua wilayah dapat mewujudkan hal tersebut sehingga pembangunan akhirnya tidak merata di seluruh wilayah. Perbedaan pembangunan antarwilayah dapat dijelaskan oleh sejumlah teori, yakni (1)teori basis ekonomi, (2) teori lokasi, (3) teori daya tarik industri (Tambunan, 2003).Teori ekonomi basismenjelaskan bahwa faktor utama penentu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh hubungan langsung permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi sektor industri di suatu wilayah yang menggunakan sumber daya produksi lokal (tenaga kerja, bahan baku, dan produk unggulan yang diekspor) akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita dan penciptaan

lapangan kerja di wilayah tersebut. Teori lokasi digunakan untuk menentukan pengembangan kawasan industri di suatu wilayah. Lokasi usaha ditempatkan pada suatu tempat yang mendekati bahan baku atau pasar. Hal ini ditentukan berdasarkan tujuan perusahaan dalam rangka memaksimalkan keuntungan dengan biaya serendah mungkin. Sedangkan teori daya tarik industri dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan industri di suatu wilayah, sehingga faktor-faktor daya tarik usaha antara lain produktivitas, industri-industri yang saling berkaitan, daya saing masa depan, spesialisasi industri, potensi ekspor, dan prospek permintaan domestik.

Dengan demikian, konsep pembangunan wilayah secara mendasar mengandung prinsip pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran nasional yang bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Dalam hal ini pembangunan wilayah merupakan upaya pemerataan pembangunan dalam pengembangan wilayah-wilayah tertentu melalui berbagai kegiatan sektoral secara terpadu, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Kota Tangerang, BPS Provinsi Banten, Bappeda Kota Tangerang, berbagai literatur, internet, dan instansi terkait lainnya. Data yang dibutuhkan adalah data PDRB sektor-sektor ekonomi menurut lapangan usaha Kota Tangerang tahun 2011-2014, inflasi, tingkat pengangguran, dan data lainnya yang relevan dan mendukung.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan tertulis yang lalu baik berupa angka maupun keterangan (Arikunto 1998). Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sederhana, dengan gambar, tabulasi, dan grafik dengan menggunakan bantuan *software* SPSS V.23 for Mac, Microsoft Office Excel 2016 for Mac.

Metode Analisis Data

Analisis Potensi Ekonomi

Dalam penelitian ini, untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah digunakan analisis *Location Quotient (LQ)*, yaitu suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Dengan menggunakan teknik ini, akan diketahui sektor unggulan dan sektor non unggulan. Analisis *Location Quotient* dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan metode ini untuk menentukan

potensi ekonomi suatu daerah, diantaranya Husna *et.al.*, (2013), Buhana dan Masyhuri (2006), dan Wicaksono (2011). Formulasi analisis ini sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Si/S}{Ni/N} \quad (1)$$

Dimana LQ= besarnya kuosien lokasi sektor *i*, S= PDRB dari sektor *i* Kota Tangerang, S = PDRB total Kota Tangerang, N= PDRB dari sektor *i* pada tingkat yang lebih luas (Provinsi Banten), N = PDRB total pada wilayah yang lebih luas (Provinsi Banten).

Jika hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas menghasilkan nilai LQ lebih besar daripada 1, maka sektor tersebut termasuk sektor unggulan (basis), yang berarti bahwa sektor tersebut memiliki peran yang penting bagi perekonomian Kota Tangerang dibandingkan daerah atasnya (Provinsi Banten). Selain itu, nilai LQ yang lebih besar dari satu memperlihatkan bahwa sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan memiliki keunggulan komparatif. Namun apabila nilai LQ lebih kecil daripada 1, berarti sektor tersebut termasuk ke dalam sektor non unggulan (non-basis), yang berarti produksi sektor tersebut hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tangerang. Jika LQ sama dengan 1 maka tingkat spesialisasi Kota Tangerang sama dengan di tingkat Provinsi Banten. Produksi komoditas yang bersangkutan hanya cukup untuk kebutuhan daerah setempat. Produksi komoditas tersebut belum mencukupi kebutuhan konsumsi di daerah yang bersangkutan dan pemenuhannya didatangkan dari daerah lain.

Analisis Proyeksi Trend

Metode analisis ini berguna untuk memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran di Kota Tangerang menggunakan analisis trend. Data yang digunakan dalam penelitian selama kurun waktu 2010-2014, yang mana peramalan yang dilakukan untuk memproyeksikan variabel ekonomi makro pada tahun 2018, yang berguna bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sesuai dengan RPJMD Kota Tangerang 2014-2018. Metode trend yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil (*least square method*). Terdapat penelitian yang menggunakan metode ini untuk melakukan proyeksi seperti penelitian yang dilakukan oleh Hairan *et.al.*, (2014), Tipka (2011), dan Djarwanto (2001) dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y_t = a + bt \quad (2)$$

Dimana Y_t = Variabel yang diramalkan pada periode ke *t*, *t* = Periode waktu, *a* = Intercep/konstanta, *b* = Besarnya perubahan variabel *Y* yang terjadi pada setiap perubahan satu unit variabel *t*. Rumus untuk mendapatkan nilai *a* dan *b* adalah:

$$b = \frac{\sum tY_t - (\sum t \sum Y_t)/n}{\sum t^2 - (\sum t)^2/n} \quad \text{dan} \quad a = \left(\sum Y_t/n \right) - b \frac{\sum t}{n} = \bar{Y} - b\bar{t} \quad (3)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan membahas mengenai; (1) potensi sektoral apa saja yang dimiliki oleh Kota Tangerang yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha Indonesia yang merupakan revisi dari KBLI Tahun 2005, maka KBLI yang digunakan dalam penyusunan PDRB Kota Tangerang tahun dasar 2010 mengacu pada Perka BPS tersebut. Berdasarkan Perka BPS No. 57 Tahun 2009, jumlah sektor (kategori) yang disajikan sebanyak 21, namun dalam publikasi ini dijadikan 17 sektor, artinya ada sektor yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kategori. Hal ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan penyajian PDRB perubahan tahun dasar 2000 ke 2010 (17 sektor) yang disajikan secara nasional; (2) proyeksi Perekonomian Kota Tangerang sampai dengan tahun 2018 meliputi PDRB ADHB, DDRB ADHK 2010, Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB, Laju Pertumbuhan PDRB beserta sektoralnya, Pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan per kapita, laju inflasi, dan terakhir proyeksi tingkat pengangguran Kota Tangerang Tahun 2018. (3) Kedua hasil analisis di atas kemudian menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh Kota Tangerang.

Analisis Potensi Ekonomi Kota Tangerang

Untuk mengetahui potensi sektor ekonomi yang mendukung PDRB Kota Tangerang digunakan analisis *Location Quotient* (LQ). Analisis ini digunakan untuk mengetahui sektor mana yang merupakan sektor unggulan dan non unggulan. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Perhitungan Indeks LQ di Kota Tangerang Tahun 2011-2014

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
1	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	0.24	0.24	0.23	0.25	0.24
2	Pertambangan & Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Industri Pengolahan	1.06	1.07	1.06	1.07	1.07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14
5	Pengadaan Air	0.80	0.78	0.82	0.82	0.81
6	Konstruksi	0.74	0.73	0.74	0.75	0.74
7	Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.00	0.97	0.98	0.98	0.98
8	Transportasi & Pergudangan	2.51	2.51	2.49	2.40	2.48
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0.61	0.59	0.59	0.60	0.60
10	Informasi dan Komunikasi	1.33	1.31	1.31	1.35	1.33
11	Jasa Keuangan	0.97	0.95	0.96	0.96	0.96
12	Real Estate	0.79	0.77	0.76	0.76	0.77
13	Jasa Perusahaan	1.08	1.06	1.04	1.05	1.06
14	Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0.65	0.63	0.63	0.63	0.64
15	Jasa Pendidikan	0.72	0.72	0.71	0.71	0.72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.74	0.73	0.73	0.77	0.74
17	Jasa Lainnya	0.91	0.89	0.90	0.93	0.91

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2015 dan BPS Provinsi Banten, 2015 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode LQ pada Tabel 2, sektor ekonomi yang termasuk dalam sektor unggulan dan memiliki keunggulan kompetitif di Kota Tangerang adalah:

Sektor Industri Pengolahan

Selama periode waktu 2011-2014, sektor ini memiliki nilai LQ > 1 dengan nilai indeks rata-rata 1.07. Artinya sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 sektor ini merupakan sektor basis atau sektor unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif karena cenderung mengekspor ke daerah lain. Sektor ini merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kota Tangerang. Kondisi geografi Kota Tangerang sangat strategi yang merupakan *hinterland* Provinsi DKI Jakarta mendorong tingginya peran sektor sekunder seperti sektor industri baik industri skala kecil maupun industri menengah yang tersebar berdasarkan kluster yang terbentuk di koridor jalan utama di Kota Tangerang. Sektor ini banyak menyerap tenaga kerja dan terjadinya transformasi kultural daerah menuju ke arah modernisasi kehidupan masyarakat. Sektor industri pengolahan dapat berkembang dengan baik juga dikarenakan pemerintah lebih mengutamakan sektor tersebut dibanding sektor-sektor lainnya sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis pembangunan ekonomi Kota Tangerang.

Sektor Transportasi dan Pergudangan

Sektor transportasi dan pergudangan memiliki indeks LQ rata-rata sebesar 2.48 sehingga dapat dikatakan bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan yang dimiliki oleh Kota Tangerang. Sarana transportasi merupakan tulang punggung pengembangan wilayah sehingga sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Prasarana transportasi di Kota Tangerang terus dikembangkan dan dimaksimalkan dalam memfasilitasi tingginya mobilitas masyarakat. Sektor ini merupakan sektor yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik di Kota Tangerang karena tersedianya Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang membuat Kota Tangerang memiliki aksesibilitas yang baik dan semakin terbuka dengan kota-kota di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, serta adanya ruas jalan tol Jakarta-Tangerang-Merak yang sekaligus dapat menunjang berbagai kegiatan perekonomian kota.

Sektor Informasi dan Komunikasi

Selama periode waktu 2011-2014, sektor ini memiliki nilai LQ > 1 yaitu dengan nilai indeks sebesar 1.33. Artinya sektor ini merupakan sektor unggulan dan cenderung mengekspor dari daerah lain. Sektor informasi dan komunikasi di Kota Tangerang terus mengalami perkembangan yang pesat. Pemanfaatan ruang udara untuk telekomunikasi yang menunjang kegiatan ekonomi serta peningkatan akses masyarakat harus terus dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

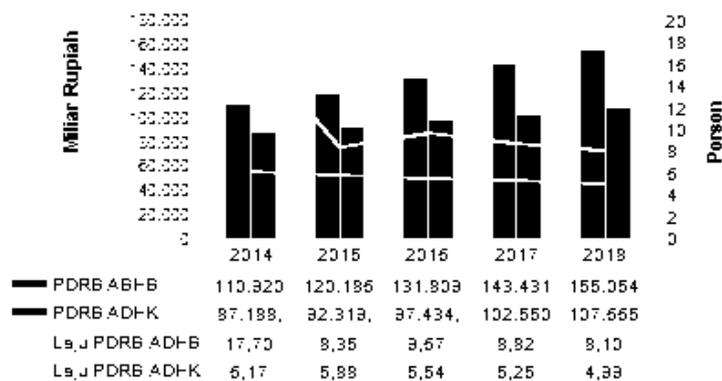
Sektor Jasa Perusahaan

Sektor jasa perusahaan merupakan adalah sektor unggulan yang dimiliki oleh Kota Tangerang karena memiliki nilai rata-rata indeks LQ > 1, yaitu sebesar 1.06. Pada tahun 2014 sektor ini memiliki laju pertumbuhan yang tinggi yang melebihi pertumbuhan PDRB Kota Tangerang, dengan laju 21.02 persen untuk ADHB dan 13.83 persen untuk ADHK 2010.

Dari 17 sektor ekonomi yang tersedia dalam klasifikasi lapangan usaha yang terdapat dalam PDRB Kota Tangerang, hanya terdapat empat sektor yang merupakan sektor unggulan, tetapi 12 belas sektor lainnya bukan merupakan sektor unggulan, yang cenderung tergantung pada kabupaten/kota yang ada Provinsi Banten. Sementara itu sektor pertambangan dan Penggalian tidak memiliki kontribusi apapun terhadap pembentukan PDRB Kota Tangerang.

Proyeksi Perekonomian Kota Tangerang Tahun 2018 Proyeksi PDRB Kota Tangerang Tahun 2018

Pada tahun 2014, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kota Tangerang mencapai 110.92 triliun rupiah. Nilai ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 PDRB Kota Tangerang diprediksi sebesar 155.05 triliun rupiah. Sementara itu, PDRB ADHK (=2010) menunjukkan pola yang relatif sama, dimana pada tahun 2014, nilai PDRB ADHK (=2010) sebesar 87.18 triliun rupiah meningkat menjadi 107.66 triliun rupiah pada tahun 2018. Laju pertumbuhan ekonomi PDRB ADHB menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun menurun. Pada tahun 2014 sebesar 17.70 persen, dan pada tahun 2018 sebesar 8.10 persen. Hal yang sama terjadi pada laju pertumbuhan PDRB ADHK (=2010), dimana pada tahun 2014 sebesar 6.17 persen, dan pada tahun 2018 sebesar 4.99 persen (lihat Gambar 1)



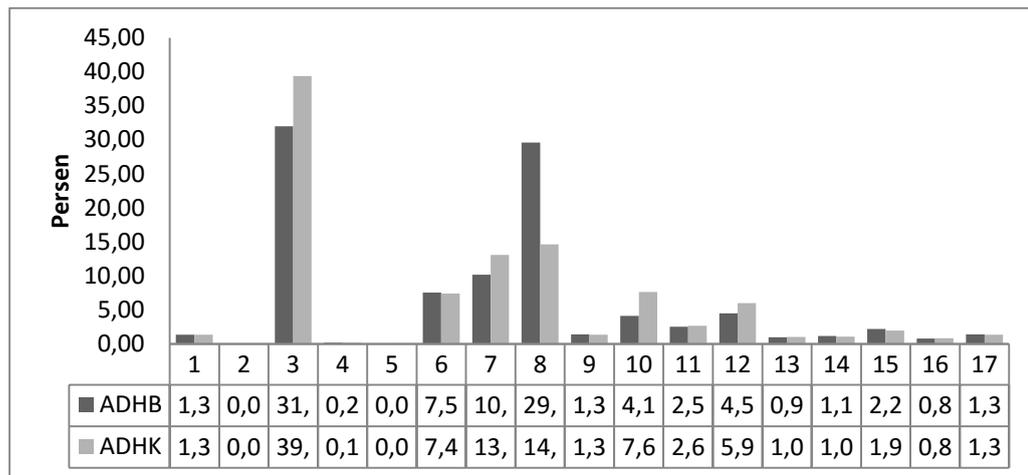
Sumber: BPS Kota Tangerang, 2015

Gambar 1
Proyeksi PDRB dan Laju PDRB Kota Tangerang 2014-2018 (Miliar Rupiah)

Pada tahun 2018, baik berdasarkan PDRB ADHB maupun PDRB ADHK (=2010), sektor ekonomi yang menunjukkan Nilai Tambah Bruto (NTB) terbesar adalah sektor industri pengolahan yang mencapai 31.9 persen dari total PDRB ADHB dan 39.3 persen dari total PDRB ADHK (=2010). Dari data ini dapat diinterpretasikan bahwa kenaikan output riil lebih besar dibandingkan kenaikan harga pada sektor industri pengolahan. Di posisi kedua adalah sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi terhadap PDRB ADHB sebesar 29.6 persen dan 14.6 persen terhadap PDRB ADHK (=2010). Data ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pada sektor transportasi dan pergudangan lebih besar dibandingkan kenaikan output riil sehingga PDRB ADHB pada sektor ini lebih besar dibandingkan dengan kontribusinya pada PDRB ADHK (=2010). Posisi ketiga ditempati oleh sektor Perdagangan dan Eceran, dan Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 10.1 persen terhadap PDRB ADHB dan 13.0 persen terhadap PDRB ADHK. Sektor ini menunjukkan pengikatan output riil (lihat Gambar 2).

Sektor yang berkontribusi paling kecil dalam pembentukan PDRB adalah sektor pengadaan air dengan proporsi sebesar 0.05 persen terhadap PDRB ADHB dan 0.07 persen terhadap PDRB ADHK (=2010). Di urutan kedua diisi oleh sektor pengadaan listrik dan gas dengan kontribusi sebesar 0.20 persen terhadap PDRB ADHB dan 0.17 persen terhadap PDRB ADHK (=2010).



Sumber: Kota Tangerang dalam Angka, 2015 (diolah)

Gambar 2
Proyeksi Distribusi PDRB Tahun 2018

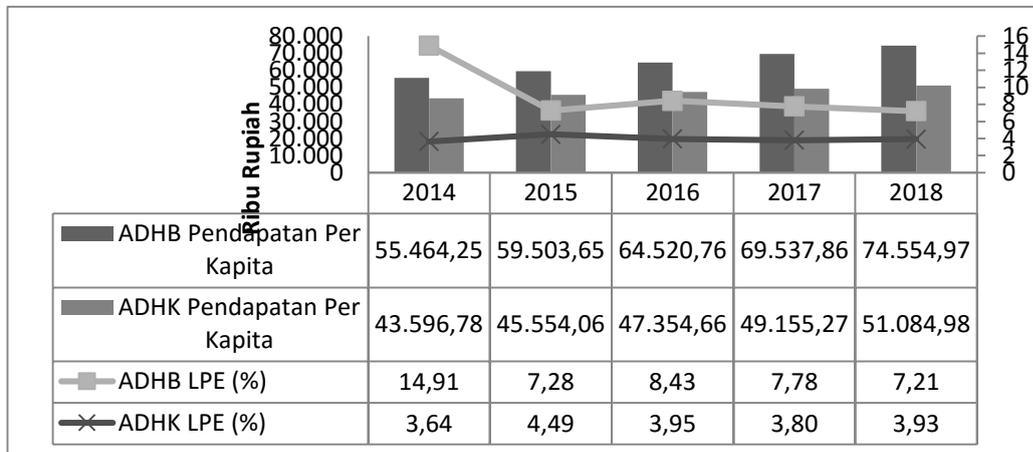
Dimana (1) Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, (2) Pertambangan & Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Pengadaan Listrik dan Gas, (5) Pengadaan Air, (6) Konstruksi, (7) Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (8) Transportasi & Pergudangan, (9) Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, (10) Informasi dan Komunikasi, (11) Jasa Keuangan, (12) Real Estate, (13) Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, (14) Jasa Pendidikan, (15) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (17) Jasa Lainnya.

Proyeksi Pendapatan Per Kapita Kota Tangerang Tahun 2018

Pendapatan per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan menunjukkan pendapatan riil penduduk dengan mempertimbangkan angka inflasi, sedangkan pendapatan penduduk yang dihitung berdasarkan harga berlaku, mencerminkan pendapatan secara bruto dengan mengesampingkan faktor inflasi, sehingga tidak menggambarkan kemampuan daya beli penduduk.

Tahun 2018, pendapatan per kapita di Kota Tangerang yang dihitung berdasarkan harga konstan dan harga berlaku diproyeksikan sama-sama mengalami kenaikan dengan masing-masing sebesar 51.08 dan 74.55 juta rupiah. Pendapatan per kapita atas harga konstan mengalami kenaikan sebesar 3.93 persen. Peningkatan ini menurun sejak tahun 2014, yang artinya laju kenaikan pendapatan lebih besar dibandingkan kenaikan jumlah penduduk. Sementara itu kenaikan pendapatan per kapita berdasarkan harga berlaku

meningkat 7.21 persen dan peningkata ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014, yakni 14.91 persen. Ilustrasi proyeksi pendapatan per kapita Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Gambar 3.

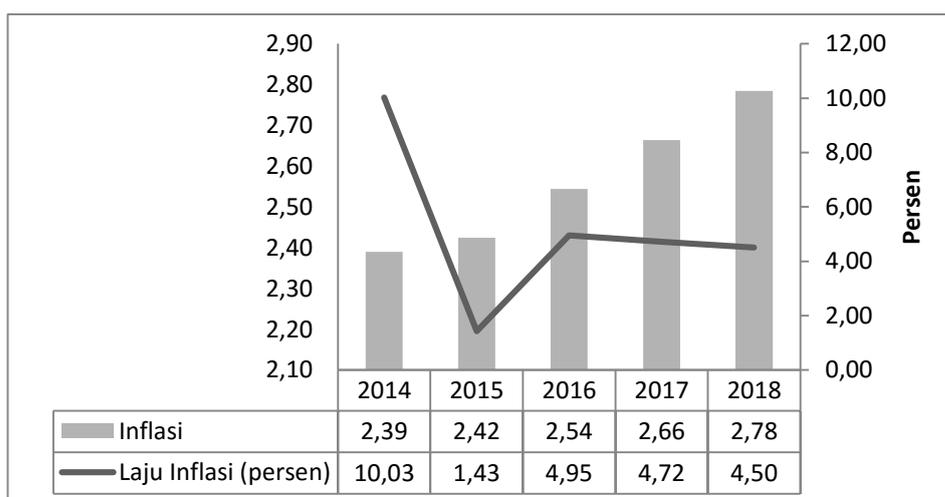


Sumber: Kota Tangerang dalam Angka, 2015 (diolah)

Gambar 3
Proyeksi Pendapatan Per Kapita Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Proyeksi Laju Inflasi Kota Tangerang Tahun 2018

Kondisi ekstrim terjadi pada laju inflasi Kota Tangerang tahun 2013, yang mengalami kenaikan lebih dari 200 persen dari tahun sebelumnya. Jika inflasi tahun 2012 hanya 4,44 persen maka tahun 2013 melonjak menjadi 10,02 persen. Semetara itu pada tahun 2014 laju inflasi kembali mengikat tajam sebesar 10,03 persen. Pada tahun 2018, laju inflasi mengalami perlambatan yaitu sebesar 4.5 persen. Ilustrasi proyeksi laju inflasi Kota Tangerang Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Gambar 4.



Sumber: BPS Kota Tangerang, 2015 (diolah)

Gambar 4
Proyeksi Inflasi Kota Tengarang Tahun 2014-2018

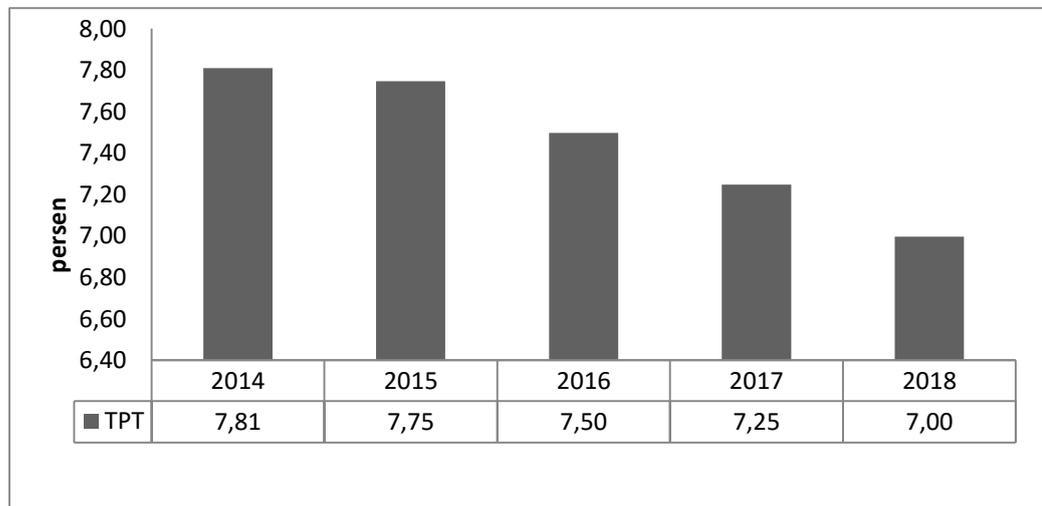
Kebijakan terkait dengan pengendalian inflasi antara lain :

- Menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan strategis berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah dengan cara merevitalisasi dolog.
- Menjamin kelancaran distribusi pasokan pangan dari sentra produksi pangan ke tempat-tempat yang memerlukannya. Pasokan pangan tidak boleh terhambat masalah cuaca, sebagaimana yang selama ini dijadikan alasan.
- Menyediakan pangan murah dengan operasi pasar murah

Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang Tahun 2018

Angka pengangguran merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyerapan tenaga kerja. Kondisi ketenagakerjaan di Kota Tangerang tidak terlepas dari data angkatan kerja, jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran itu sendiri.

Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, *trend* indikator ini akan menunjukkan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Gambar 5 menunjukkan proyeksi TPT Kota Tangerang tahun 2014-2018.



Sumber: BPS Kota Tangerang, 2015 (diolah)

Gambar 5
Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa proyeksi tingkat pengangguran Kota Tangerang selama tahun 2014-2018 mengalami penurunan dari 7.81 persen menjadi 7.00 persen. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam hal iklim ketenagakerjaan. Namun walaupun demikian, masih terdapat jumlah pengangguran yang harus disediakan lowongan kerja bagi mereka. Dalam

kondisi seperti ini, maka perlu adanya pengarahan pembangunan yang ramah ketenagakerjaan (*employment-growthfriendly*), pembangunan harus mereposisi paradigma pada orientasi ketenagakerjaan yaitu penciptaan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga pendayagunaan tenaga kerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan dapat tercapai.

Terdapat beberapa kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengurangi tingkat pengangguran, diantaranya:

- Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen.
- Bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar kepada pelaku UMKM, serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya
- Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya lapangan pekerjaan baru. Membantu para pengangguran terdidik untuk menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMD, BUMS dan pihak lainnya.
- Meningkatkan teknologi dan sistem pendidikan. Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan.

Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan mendorong pertumbuhan inklusif:

Terdapat beberapa kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuat kebijakan dibidang investasi:

- Dapat dilakukan melalui peningkatan investasi merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan investasi pada sektor-sektor unggulan seperti sektor (1) sektor industri pengolahan (2) transportasi dan pergudangan (3) informasi dan komunikasi, (4) jasa perusahaan perlu didorong karena sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kota Tangerang termasuk sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
- Peningkatan efisiensi birokrasi dan pencegahan korupsi melalui penyederhanaan prosedur perijinan usaha, regulasi dan *law enforcement*, serta sistem pengajuan usaha online yang terintegrasi dengan sistem perbankan.
- Kebijakan perluasan akses pembiayaan dengan program memfasilitasi akses pembiayaan khususnya bagi pengusaha UMKM. memfasilitasi/memediasi pengusaha dan perbankan untuk menjembatani permasalahan yang berhubungan dengan pembiayaan investasi; dan meningkatkan peran serta masyarakat dan koperasi alternatif dalam pembangunan.
- Pajak dan retribusi yang dilakukan dengan mengembangkan strategi pajak yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan strategi investasi; memberikan Insentif pajak melalui keringanan pajak; mewujudkan transparansi, kejelasan, dan keterprediksian dalam peraturan perpajakan; dan

melaksanakan konsultasi secara reguler yang melibatkan pembuat kebijakan pajak dan investasi.

- Kebijakan *terakhir* adalah peningkatan kerjasama dan promosi investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui gelar potensi dan temu usaha.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

Hasil analisis menggunakan *Location Quotient* menunjukkan bahwa terdapat empat sektor ekonomi yang memiliki potensi dan keunggulan kompetitif di Kota Tangerang dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Banten, yaitu (1) sektor industri pengolahan, (2) transportasi dan pergudangan, (3) informasi dan komunikasi, (4) jasa perusahaan. Hasil analisis proyeksi perekonomian Kota Tangerang menunjukkan bahwa: (1) pada tahun 2018 diperkirakan PDRB ADHB dan PDRB ADHK mengalami kenaikan dengan laju masing-masing sebesar 8.10 persen dan 4.99 persen. Sektor yang paling berkontribusi besar dalam pembentukan PDRB adalah sektor industri pengolahan dan sektor transportasi dan pergudangan, (2) proyeksi PDRB per kapita pada tahun 2018 sebesar Rp74.55 juta dengan laju pertumbuhan sebesar 7.21 persen untuk PDRB ADHB. Bila dihitung berdasarkan atas harga konstan (=2010) diperkirakan pendapatan per kapita sebesar Rp51.08 juta dengan laju pertumbuhan 3.93 persen, (3) laju Inflasi pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 4.50 persen, lebih rendah dibanding dengan tahun 2014, (4) tingkat pengangguran Kota Tangerang mengalami penurunan sepanjang tahun, dimana tahun 2018 sebesar 7.00 persen sedangkan pada tahun 2014 sebesar 7,81 persen. Studi ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran mengenai potensi dan proyeksi ekonomi makro Kota Tangerang dimasa mendatang kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil studi, maka penting bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk merumuskan suatu kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang. Melalui kebijakan yang efektif diharapkan pertumbuhan ekonomi naik secara signifikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2015. Kota Tangerang Dalam Angka. BPS Kota Tangerang. Tangerang
- Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bina Aksara. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2015. Banten Dalam Angka. BPS Provinsi Banten. Banten
- Buhana E; Masyhuri. 2006. Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian di Kabupaten Brebes. *Jurnal Agrosains* 19(1): 81-95.
- Damanhuri, DS, dkk. 1997. *Tinjauan Kritis Idiologi Liberalisme dan Sosialisme*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen dalam Negeri.
- Djarwanto. 2001. *Statistik Sosial Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta

- Hairani RI, Joni MMA. dan Jani J. 2014. Analisis Trend Produksi Dan Impor Gula Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Gula Indonesia. *Berkala Ilmiah Pertanian*1(4): 77-85
- Husna N, Irwan Noor, dan Mochammad Rozikin. 2013. Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi Publik*1(1):188-196
- Jinghan, ML. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. penerjemah D Guritno. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta
- Lipsey, RG, dkk. 1995. *Pengantar Mikro Ekonomi*. Edisi Kesepuluh.Binarupa Aksara.Jakarta
- Nicholson, W. 1999. *Teori Mikro Ekonomi*. Edisi kelima.Binarupa Aksara.Jakarta
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Baduose Media.Padang
- Sukirno S. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Cetakan Ketiga.Penerbit Kencana.Jakarta
- Tambunan, T. 2003. *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia.Jakarta
- Taringin, R. 2002. *Rencana Pembangunan Wilayah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Medan.
- Tjitroesmi E, dkk. 2006. *Investasi di Era Otonomi Daerah*. Pusat Penelitian P2E-LIPI. Jakarta
- Tipka J. 2011. Proyeksi Penduduk Berlipat Ganda di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Berekeng* 5(2): 31-34
- Todaro, MP. dan S.C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke-3*. Erlangga.Jakarta
- Wicaksono IA. 2011. Analisis Location Quotient Sektor dan Subsektor Pertanian Pada Kecamatan di Kabupaten Purworejo. *Jurnal MEDIAGRO* 7(2):11-18